

Press Release

Tenggelamnya Lahan Basah

Jakarta, 12 Maret 2025

Selain karhutla yang selama ini menjadi fokus perhatian publik, banjir juga merupakan ancaman serius yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem gambut. Melalui peluncuran studi *Tenggelamnya Lahan Basah*, Pantau Gambut memaparkan ancaman banjir di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia yang dibagi ke dalam tiga regional: Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Sebagai bagian dari ekosistem lahan basah, pada hakikatnya gambut memang harus tergenang air. Namun, saat degradasi lahan gambut terjadi, kemampuannya untuk menyerap air akan jauh berkurang. Fenomena *irreversible drying*¹ ini yang menyebabkan genangan air menjadi limpasan yang tidak terkontrol dan justru menciptakan daya rusak kepada lingkungan sekitarnya.

Wahyu Perdana, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut menjelaskan, “Banjir yang terjadi bukanlah siklus alami yang umum terjadi pada ekosistem gambut. Banjir ini disebabkan oleh degradasi lahan gambut akibat ketidaksesuaian peruntukan fungsi ekosistem gambut.” Baik manusia maupun keanekaragaman hayati yang ada, semua yang hidup pada ekosistem ini menjadi terdampak.

Provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), faktanya juga masuk ke dalam daftar wilayah dengan kerentanan banjir. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan menjadi tiga wilayah teratas dengan kerentanan banjir terluas. Jika ditotal secara keseluruhan, setidaknya 25% KHG di Indonesia mengalami kerentanan tinggi terhadap banjir, diikuti 18% dengan kerentanan sedang, dan 57% kerentanan rendah. Wahyu menambahkan, “Ini berarti 6 juta dari 24 juta hektare KHG di Indonesia sangat rentan banjir.”

Area yang terdampak bukan hanya wilayah yang memiliki gambut pedalaman. Rusaknya gambut juga menyebabkan penurunan muka tanah (*subsidence*) secara signifikan pada wilayah pesisir. Lahan gambut yang dulunya berfungsi sebagai penahan alami terhadap intrusi air laut, kini justru memperparah masalah banjir rob. Selain risiko banjir yang meningkat, cadangan air tawar juga berkurang akibat meresapnya air laut ke dalam air tanah (*intrusi*).

Terdapat tiga poin penting yang menjadi fokus advokasi Pantau Gambut:

1. Memasukkan variabel teknis yang berkenaan dengan indikator banjir dalam degradasi ekosistem gambut sebagai penyempurnaan PP No. 57 Tahun 2016 *jo*. PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Variabel teknis ini menjadi penting tidak hanya pada regulasi nasional, tetapi juga pada komitmen global.
2. Memasukkan indikator tata kelola hidrologis gambut dalam regulasi terhadap sektor jasa keuangan.

¹ Kondisi di mana lahan gambut yang telah dikeringkan secara berlebihan, berdampak pada hilangnya kelembaban dan kemampuannya untuk menahan air secara permanen, sehingga menyebabkan degradasi ekosistem yang tidak dapat dipulihkan.



3. Memperkuat kelembagaan khusus dan kewenangan lintas sektoral dalam perlindungan ekosistem gambut untuk mengurangi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas restorasi. Hal ini mengingat bahwa ekosistem gambut tidak terbatas pada batas administratif, tetapi dilakukan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Anda bisa mengakses laporan Tenggelamnya Lahan Basah dan infografis berikut, melalui bit.ly/TenggelamnyaLahanBasah.

Pantau Gambut meluncurkan studi **Tenggelamnya Lahan Basah** mengenai ancaman banjir di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia.

Selain karhutla yang selama ini menjadi fokus perhatian, banjir juga merupakan ancaman serius yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem gambut.

Sebagai bagian dari ekosistem lahan basah, pada hakikatnya gambut memang harus tergenang air. Namun, saat degradasi lahan gambut terjadi, kemampuannya untuk menyerap air akan jauh berkurang.

Fenomena *irreversible drying* ini menyebabkan genangan air menjadi tidak terkontrol dan justru menciptakan daya rusak kepada lingkungan sekitarnya.

B

Degradasi lahan gambut pesisir mengakibatkan penurunan muka tanah yang signifikan dan **meningkatkan risiko banjir rob**.



Poin penting yang menjadi fokus advokasi Pantau Gambut:

- 1 Memasukkan variabel teknis yang berkenaan dengan indikator banjir pada degradasi ekosistem gambut dalam regulasi nasional dan komitmen global.
- 2 Memasukkan indikator tata kelola hidrologis gambut dalam regulasi terhadap sektor jasa keuangan.
- 3 Memperkuat kelembagaan khusus dan kewenangan lintas sektoral dalam perlindungan ekosistem gambut untuk mengurangi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas restorasi.

A

Secara keseluruhan area KHG di Indonesia yang masuk dalam kategori kerentanan banjir

- !!! **25%** masuk kerentanan banjir tinggi
- !! **18%** masuk kerentanan banjir sedang
- ! **57%** masuk kerentanan banjir rendah

Banjir yang terjadi bukanlah siklus alami yang umum terjadi pada ekosistem gambut

Flora dan fauna endemik ikut terdampak banjir

C

Tiga provinsi dengan tingkat kerentanan banjir tinggi terluas akibat kerusakan lahan gambut:

- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Barat
- Sumatera Selatan

D



6 juta dari 24 juta

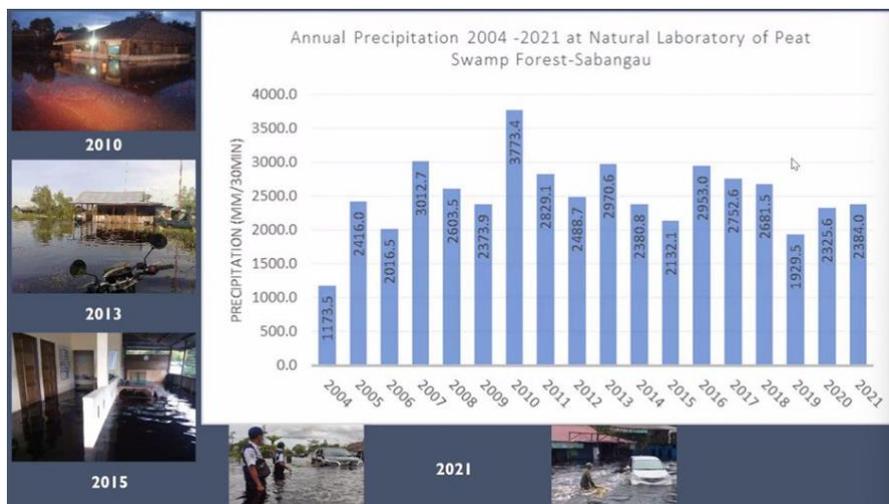
hektare KHG di Indonesia sangat rentan banjir.



Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apakah kerusakan lahan gambut menyebabkan perubahan pola genangan air yang dapat membanjiri suatu wilayah?

- Ya, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan perubahan pola genangan air. Perubahan ini dapat dilihat menggunakan beberapa indikator penguat seperti curah hujan pada suatu wilayah. Indikator ini bisa melihat perubahan pola genangan yang dapat membanjiri akibat lahan gambut yang rusak.
- Kasus yang terjadi pada wilayah Sebangau, Kalimantan Tengah dapat menjadi contoh. Setelah kasus karhutla besar tahun 2015–2019, sebaran banjir makin meluas dan debit air banjir ikut meningkat. Penelitian dari Laboratorium Hutan Rawa Gambut Sebangau menunjukkan bahwa pada tahun 2010, area ini hanya tergenang saja. Namun, sebaran banjir semakin meningkat dari tahun ke tahun, padahal curah hujan yang terjadi pada area tersebut hampir sama setiap tahunnya, seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



2. Bagaimana cara mengetahui banjir yang terjadi di suatu tempat adalah dampak dari degradasi ekosistem gambut?

- Apabila suatu hamparan lahan gambut yang dibiarkan terbuka dan/atau terdegradasi melalui alih fungsi untuk jenis tanaman ekstraktif, tidak mampu lagi menyerap air dan menimbulkan genangan dan aliran permukaan dengan intensitas yang sering dan skala yang luas. Idealnya, air mampu diserap gambut yang sehat karena karakteristik alami gambut yang menyerupai spons.
- Lahan gambut alami biasanya mampu menyerap air dengan baik. Jika terjadi genangan air yang luas dan bertahan lama di daerah yang sebelumnya tidak tergenang, itu indikasi bahwa sistem hidrologisnya terganggu.
- Jika curah hujan tidak terlalu ekstrem tetapi tetap terjadi banjir, ini bisa menjadi tanda bahwa lahan gambut telah kehilangan kemampuan menyerap air akibat degradasi. Curah hujan yang tinggi akan memperparah bencana banjir yang terjadi karena drainase gambut yang telah rusak menyebabkan tanah memadat (subsiden) dan kehilangan kemampuan menyerap air

- Secara visual, banjir di lahan gambut ditandai dengan air yang keruh dan berwarna coklat kehitaman.
3. *Siapa pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi kerentanan banjir ini?*
- Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang memiliki kewenangan langsung dalam melakukan pengawasan, perlindungan, dan restorasi ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam PP No. 57 Tahun 2016 *jo.* PP No. 71 Tahun 2014.
 - Korporasi yang beroperasi di lahan gambut/KHG, khususnya dalam konteks kepatuhan konsesi terhadap baku mutu gambut dengan fungsi budidaya dalam hal pencegahan dan pemulihan pasca-karhutla.
4. *Di bulan apa saja puncak kerentanan banjir ini dapat terjadi?*
- Puncak kerentanan banjir biasanya terjadi pada periode monsun barat yang ditandai dengan musim penghujan dan berlangsung dari bulan Oktober-April.
5. *Apakah studi ini sudah melewati supervisi dari pakar maupun akademisi?*
- Ya, studi ini sudah melewati supervisi pakar dan akademisi gambut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Centre for International Co-operation in Sustainable Management of Tropical Peatland (CIMTROP) Universitas Palangkaraya.
 - Penelitian ini menggunakan metode *Expert Adjustment* untuk menentukan pentingnya setiap parameter yang mempengaruhi limpasan banjir. Para ahli berperan untuk memberikan penilaian terhadap setiap parameter yang telah ditentukan. Penilaian para ahli ini kemudian diintegrasikan ke dalam model prediksi limpasan banjir menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Dengan demikian, dapat diidentifikasi daerah-daerah yang paling rentan terhadap banjir dan disusun strategi mitigasi yang tepat.

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Abil Salsabila (Juru Kampanye Pantau Gambut)	abil@pantaugambut.id
Yoga Aprillianno (Tim Komunikasi Pantau Gambut)	yoga.aprillianno@pantaugambut.id
Instagram & Twitter	@pantaugambut

Kenapa Gambut Penting

Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut di Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat karbon tanah mineral biasa. Cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut akan terlepas ke udara jika lahan gambut dikeringkan atau dialihfungsikan. Padahal, gambut menyimpan sekitar 30% karbon dunia. Gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer akan menahan panas dari matahari sehingga meningkatkan suhu bumi. Proses yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini dapat mempercepat laju perubahan iklim. Oleh sebab itu, melindungi dan mencegah kerusakan lahan gambut menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi tentang gambut lainnya, Anda bisa mengakses tautan pantaugambut.id/pelajari.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.